

Judul : Pemerintah Beri Subsidi Biaya Haji
Tanggal : Kamis, 08 Oktober 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 15

Pemerintah Beri Subsidi Biaya Haji

Dengan subsidi pemerintah, biaya pelunasan yang dibayarkan calon jemaah haji rata-rata Rp 23 juta.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengalokasikan subsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sebesar Rp 3,2 juta per anggota jemaah. Dengan demikian, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang harus dibayar setiap anggota jemaah haji turun jadi rata-rata Rp 23.048.825.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Haji dan Umrah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Rapat itu dihadiri antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, serta Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. Selain itu, hadir juga Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Pemerintah dan DPR mengumumkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) musim haji 1448 Hijriah/2027 Masehi sebesar Rp 98.466.351,35. Komponen biaya ini mencakup, antara lain, BPIH di dalam negeri Rp 5,64 juta, BPIH di Arab Saudi Rp 54,31 juta, dan komponen biaya penerbangan per anggota jemaah Rp 38,50 juta.

Biaya BPIH itu meningkat dibandingkan musim haji 1447 H/2026 M, yakni Rp 87,4 juta setiap orang. Pada 2027, jumlah jemaah haji reguler tercatat 203.320 orang, se-

dangkan jemaah haji khusus sebanyak 17.650 orang.

Adanya formula subsidi sesuai instruksi Presiden tersebut mampu menurunkan beban biaya jemaah sebesar Rp 3.384.981,58 dibandingkan tahun lalu. Dana subsidi bersumber dari APBN.

"Hasil komunikasi kami, DPR dengan pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memutuskan untuk mensubsidi biaya penyelenggaraan haji," ujar Dasco.

Pembiayaan BPIH pada 2027 bersumber dari pembayaran langsung oleh jemaah haji rata-rata sebesar Rp 54.648.825 (55,5 persen) serta nilai manfaat pengelolaan keuangan haji sebesar Rp 43.817.526,35 (44,5 persen). Dari jumlah BPIH yang harus dibayarkan itu, jemaah haji telah membayar setoran awal sebesar Rp 25 juta.

Struktur pelunasan bipih jemaah pada 2027 juga mengalami penyesuaian yang meringankan beban jemaah. Dari total bipih Rp 54.648.825,00, jumlah itu dikurangi dengan setoran awal jemaah sebesar Rp 25 juta, perolehan *virtual account* sebesar Rp 3,4 juta, serta adanya subsidi pemerintah sebesar Rp 3,2 juta. Dengan demikian, sisa biaya pelunasan yang harus dibayarkan oleh jemaah menjadi rata-rata Rp 23.048.825,00.

Besaran bipih per orang akan bervariasi berdasarkan

embarkasi keberangkatan masing-masing.

Prinsip keberlanjutan

Fadlul mengemukakan, pihaknya mendukung kebijakan yang memberikan kemudahan bagi jemaah. BPKH terus mengoptimalkan nilai manfaat keuangan haji agar beban pelunasan jemaah haji tahun 2027 diharapkan lebih ringan. "Namun, kemudahan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan keuangan haji," ucapnya.

Irfan mengatakan, pemerintah menganggap bahwa situasi geopolitik di luar negeri jangan membebani calon jemaah haji Indonesia. Karena itu, Presiden Prabowo memutuskan memberikan subsidi agar meringankan calon jemaah haji.

Salah satu tantangan dari biaya haji adalah kenaikan biaya dipicu kondisi geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah berharap situasi geopolitik mereda dan menyiapkan antisipasi untuk tahun 2028, di antaranya akselerasi Badan Pelaksana BPKH.

"(Subsidi) Mudah-mudahan memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk jemaah haji," kata Irfan.

Adapun Panitia Kerja Komisi VIII DPR menyetujui sisa nilai manfaat untuk jemaah tunggu berkisar Rp 2,6 triliun yang akan dialokasikan kepada 5,5 juta anggota jemaah. (LKT/SON)